

Banggar DPRD Usulkan Bentuk Pansus

SEMARANG- Kabar raibnya uang milik Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar yang didepositokan di bank BTPN membuat berang pegiat anti korupsi dan anggota DPRD Semarang. Pihak kepolisian didesak segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Walikota dan pihak dalam BTPN ini.

**SKAND
DEPOSITO
PEMKOT**

Walikota Diduga Terlibat

WALIKOTA

Selasa (17/3).

Eko meminta agar kepolisian yang mendapat laporan hilangnya uang negara itu mengusut secara tuntas. Dia menyarankan agar melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang melakukan audit keuangan daerah. "BPK pasti tahu, uang yang disimpan itu biasanya silpa anggaran yang dianggap uang lebih dan digunakan oleh pejabat," ujar Sekretaris KP2KKN tersebut.

Eko menuding raibnya uang Pemkot Semarang itu masuk kategori korupsi. Yang hilang uang negara, dalam hal ini uang milik Pemkot. Kecurigaan lain adanya korupsi adalah uang itu disimpan di BTPN, padahal biasanya uang pemerintah daerah disimpan di bank plat merah seperti Bank Jateng.

Selain curiga atas keterlibatan Walikota, Eko juga menduga ada orang bank yang ikut mencairkan uang milik rakyat tersebut. Hal itu terkait dengan simpang-siurnya pelaporan raibnya uang bank yang menunjukkan antara bank dan Pemkot terjadi saling melaporkan.

"BTPN melaporkan kehilangan uang ke Polda, sementara Pemkot Semarang melaporkan ke Polrestabes Semarang," katanya. Raibnya uang milik Pemkot diketahui dari laporan ke Polrestabes Kota Semarang, pada Senin (16/3) malam. Uang yang disimpan Pemkot Semarang di bank BTPN sejak tahun 2007 itu raib dari angka sebenarnya senilai Rp

22 miliar.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Semarang HA Supriyadi meminta agar aparat kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas. "Kasusnya sudah dilaporkan ke penyidik kepolisian, silahkan penyidik bekerja secara profesional," katanya. Kalau ada pegawai Pemkot yang terlibat harus mendapatkan sanksi.

"Demikian juga sebaliknya jika ada pejabat BTPN yang diduga terlibat ya harus kena sanksi, ini aset Pemkot yang harus diselamatkan," ujar Supriyadi.

Sementara itu anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto menyatakan raibnya uang Pemda itu bisa diketahui dari nama siapa kuasa pemegang sertifikat deposito.

"Biasanya bendahara daerah, dalam hal ini DPKAD," kata Wachid. Sertifikat itu biasanya disimpan di safety box milik bank dan bisa dicairkan oleh bank sesuai dengan nama kuasa deposit. Wachid bersama sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang berencana mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) yang mengusut kasus raibnya uang Pemkot Semarang itu.

"Kalau disetujui tentu kami bentuk pansus, apalagi saat ini BPK sedang mengaudit keuangan Pemkot," katanya.

BTPN Bungkam

Area Business Leader BTPN Semarang, Aris Pan-

dan Setiawan saat dikonfirmasi *Jateng Pos*, Selasa (17/3) siang kemarin mengaku, tak berwenang memberikan statement. Alasan Aris, konfirmasi dilakukan satu pintu melalui Corporate Communication BTPN di Jakarta.

"Maaf, saya tidak berwenang kasih penjelasan. Semua diambil alih satu pintu dari Corporate Communication di Jakarta, bisa hubungi Ibu Swasti atau Ibu Enny," kata Aris, tak berpanjang lebar, sembari memberikan nomor kontak nama yang disebutkannya.

Namun begitu, saat *Jateng Pos* berusaha mencari konfirmasi ke Corporate Communication BTPN, Swasti, hanya menjanjikan akan segera memberikan keterangan pers. Hingga petang saat kembali ditagih janjinya, Swasti berdalih sedang rapat.

Begitu pula saat *Jateng Pos* menghubungi Corporate Communication BTPN, Enny. Saat ditelepon, pihaknya mengaku sedang rapat dan akan segera menelepon balik. Namun, hingga berita diturunkan, baik Swasti maupun Enny, keduanya tak kunjung memberikan statement. Sedangkan telepon selulernya saat dihubungi tidak diangkat, dan SMS pun tak dibalasnya.

Hingga tadi malam pihak bank yang berdiri sejak tahun 1958 ini belum memberikan konfirmasi apapun terkait dugaan raibnya uang senilai Rp 22 miliar milik rakyat tersebut. (sgt/aln/muz)

Pegiat anti korupsi menuding raibnya uang deposito milik Pemkot Semarang tersebut melibatkan Walikota Semarang yang menjabat saat itu. Uang negara yang didepositokan di Bank Tabungan Pensi-

unan Negara (BTPN) Cabang Semarang sebesar Rp 22 miliar pada tahun 2007, ternyata saat ini tinggal tersisa Rp 80 juta.

"Ini pasti melibatkan kepala daerah, biasanya ada disposisi Kepala Daerah (Walikota, red) sebelum pencairan," ujar pegiat Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto,

■ Baca WALIKOTA...hal 7

KRONOLOGIS DEPOSITO PEMKOT RAIB

- Tahun 2007 Pemkot Semarang menyimpan dana kas daerah APBD ke BTPN Jl Pandanaran Rp 22 miliar.
- Tahun 2011 dilakukan MoU penyimpanan dana antara Pemkot Semarang dan BTPN.
- Oktober 2014 BPK minta Pemkot diminta membuat MoU baru atas semula giro diubah ke deposito.
- Tanggal 6 Januari 2015 Pemkot menyelenggarakan MoU dengan 7 bank, BTPN tidak hadir.
- Pertengahan Januari 2015 Kepala DPKAD mendatangi BTPN menunjukkan sertifikat deposito.
- Pihak BTPN tidak mengakui keaslian sertifikat, menyebut ada tiga rekening baru atas nama Pemkot Semarang.
- Deposito Pemkot yang disimpan di BTPN semula Rp 22 miliar tinggal Rp 80 juta

** Dirangkum dari sumber terkait